



PEMKO
BANJARBARU

RENJA PERUBAHAN

**Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah**



TAHUN 2023

Jl. Panglima Batur No.3 Banjarbaru. Telp (0511)4773615

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Penyusunan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB, Pengendalian dan Pengembangan serta Sekretariat.

Adapun mekanisme penyusunan Renja dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh bidang yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra, Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan kesesuaian dengan Renja SKPD Pemko dengan Renja SKPD Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. M a k s u d

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Tahunan Daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan Tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3.2. T u j u a n

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi dan arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra BPPRD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPRD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPRD

BAB V. PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terbagi dalam 6 (enam) Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp.475.702.500 dan terealisasi sebesar Rp. 385.295.000 atau sebesar 80,99%.
- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.118.255.500 dan terealisasi sebesar Rp.1.035.407.864 atau sebesar 92,59%.
- c. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 431.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 398.049.850 atau sebesar 92,35%.
- d. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.430.460.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.403.219.000 atau sebesar 98,10%.
- e. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 372.630.000 dan terealisasi sebesar Rp. 363.707.000 atau sebesar 97,61%.
- f. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 449.919.250 dan terealisasi sebesar Rp. 354.320.500 atau sebesar 78,75%.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan

penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Adapun realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 2022
Eselon III

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Perubahan	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Bidang Pajak & Retribusi Daerah						
1.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rupiah	83.365.586.175	88.865.586.175	98.922.268.133,50	111,31
2.	Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	12.176.611.340	9.815.925.000	11.451.781.440	116,67
3.	Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	NPWPD	24	50	83	166
Bidang PBB & BPHTB						
1	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	Rupiah	14.522.559.825	15.022.559.825	17.401.383.813	115,84
2	Meningkatkan Penerimaan BPHTB	Rupiah	41.000.000.000	47.000.000.000	49.597.972.865	105,53
3	Menurunnya Tunggakan PBB-P2	Rupiah	4.500.000.000	4.000.000.000	4.156.844.087	103,92
Bidang Pengendalian Pengawasan						
1	Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100
2	Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100
3	Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100

Tabel II.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2022

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 2022
Esselon IV

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Perubahan	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah potensi wajib pajak dan retribusi yang berhasil di verifikasi	Laporan	12	12	12	100
2	Jumlah potensi wajib pajak dan retribusi yang berhasil di validasi	Laporan	12	12	12	100
3	Jumlah laporan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) yang tervalidasi dan terverifikasi	Laporan	9	12	12	100
4	Jumlah laporan retribusi yang tervalidasi dan terverifikasi	Laporan	12	12	12	100
5	Jumlah penurunan tunggakan objek pajak dan retribusi daerah	Laporan	12	12	12	100
6	Jumlah data PBB-P2 yang Tervalidasi dan Terverifikasi	Laporan	12	12	12	100
7	Jumlah data BPHTB yang Tervalidasi dan Terverifikasi	Laporan	12	12	12	100
8	Jumlah laporan PBB-P2 yang tervalidasi dan terverifikasi	Laporan	12	12	12	100
9	Jumlah laporan BPHTB yang tervalidasi dan terverifikasi	Laporan	12	12	12	100
10	Jumlah Penurunan Tunggakan PBB-P2	Laporan	4	4	4	100
11	Jumlah rekonsiliasi yang terlaksana	Laporan	12	12	12	100
12	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	Laporan	4	4	4	100
13	Jumlah pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak daerah	Laporan	4	4	4	100
14	Jumlah survei yang dilaksanakan kepada masyarakat	Laporan	2	2	2	100

Tabel II.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Esselon IV Tahun 2022

2.2 Evaluasi RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. BPPRD

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Bidang PBB & BPHTB					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	Rp. 19.522.559.825,-	2.544.731.900,-	Rp. 8.804.326.582	Rp.1.098.754.358
		Meningkatkan Penerimaan BPHTB	Rp. 47.000.000.000,-		Rp.24.274.237.483	
		Menurunnya Tunggakan PBB-P2	Rp.4.000.000.000,-		Rp. 2.628.608.984	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	32 dokumen	1.466.476.600,-	16 laporan	Rp.772.392.500
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 & BPHTB)	12 laporan	1.078.255.300,-	6 laporan	Rp.326.361.858
2	Bidang PRD					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rp.93.895.586.175,-	2.036.630.000,-	Rp.56.319.175.895	Rp.366.949.700
		Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.12.877.857.810,-		Rp. 6.282.355.142	
		Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	50 NPWPD		33 NPWPD	
	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	9 Dokumen	495.630.000,-	6 Dokumen	Rp.209.139.500

	Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	12 Dokumen	1.541.000.000,-	6 Dokumen	Rp.157.810.200
3	Bidang DALBANG					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	100%	868.717.100,-	50%	Rp. 214.475.500
		Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah	100%		50%	
		Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	100%		50%	
	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 dokumen	452.400.000,-	2 dokumen	Rp.125.344.000
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 laporan	416.317.100,-	2 laporan	Rp.89.131.500
4	Sekretariat					
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	55.750.000	50%	Rp.23.988.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	Rp.10.918.750
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30.750.000	6 Laporan	Rp.13.069.250

	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.975.665.192	50%	Rp.6.645.306.365
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	12.956.184.692	51 Orang/Bulan	Rp.6.637.800.115
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	19.480.500	4 Laporan	Rp.7.506.250
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	28.250.000	50%	Rp.28.250.000
	Sub Keg : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	28.250.000	2 Laporan	Rp.28.250.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	848.417.850	50%	Rp.412.015.574
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	40.000.000	1 Paket	Rp.16.145.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	389.716.750	4 Paket	Rp.99.082.050
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.852.600	1 Paket	Rp.15.405.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.028.500	1 Dokumen	Rp.1.160.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	367.820.000	25 laporan	Rp.280.223.524

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	271.000.000	50%	Rp.260.200.000
	Sub Keg : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	33 Unit	271.000.000	18 Unit	Rp.260.200.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Internal	100%	317.796.588	50%	Rp.65.686.785
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	6 Laporan	Rp.12.856.785
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	287.796.588	6 Laporan	Rp.52.830.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	394.515.000	50%	Rp.137.682.127
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.995.000	1 unit	Rp.14.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	293.550.000	18 Unit	Rp.96.072.127
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	27.020.000	26 Unit	Rp.10.010.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	Rp.35.950.000	25 unit	Rp17.100.00
--	--	--	---------	---------------	---------	-------------

b. UPT 1

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97.204.500	50%	38.265.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.000.000	4 Paket	8.801.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	58.410.500	4 Paket	26.399.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.219.000	1 Paket	2.465.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000	-	-
2	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.530.000	50%	-

	Sub Keg : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.530.000	2 Unit	-
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.400.000	50%	20.807.194
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	6 Laporan	13.057.194
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000	6 Laporan	7.750.000
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.362.000	50%	12.193.124
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	28.042.000	4 Unit	11.563.124
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.880.000	1 Unit	250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.440.000	1 Unit	380.000

c. UPT 2

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Sampai Dengan Triwulan II	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	88.245.000	50%	30.235.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.000.000	4 Paket	6.291.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	49.450.000	4 Paket	20.613.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.220.000	1 Paket	2.565.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	765.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000	-	-
2	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.660.000	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3 Unit	10.500.000	-	
	Sub Keg : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.160.000	-	

3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45.600.000	50%	19.504.286
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000	6 Laporan	11.754.286
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000	6 Laporan	7.750.000
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	34.216.000	50%	12.226.092
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	31.166.000	2 Unit	11.251.092
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000	1 Unit	975.000

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Hasil analisis Pencapaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru disajikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi 2022
Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp. 150.888.146.000	Rp. 165.935.664.561,50
Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp. 9.815.925.000,-	Rp.11.451.781.440,-
Rasio pendapatan asli daerah (PAD)	100%	104,4%
Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	100%	91,13%

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih dari 100%, tercapainya target kinerja disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Melakukan jemput bola/penagihan pajak langsung kepada wajib pajak;
2. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi;
3. Memberikan reward kepada wajib pajak yang taat dan patuh;
4. Pendataan kelapangan atas objek pajak yang lebih intensif;
5. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.

Melihat dari hasil realisasi indikator kinerja utama (IKU) untuk tahun 2022 yang berhasil diraih, maka untuk target perubahan tahun 2023 terjadi kenaikan yaitu menjadi Rp.170.418.146.000,- dan target retribusi mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp. 12.988.471.875,-

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Penghambat

- Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah;
- Kurang optimalnya pengawasan;
- Belum optimalnya pelayanan berbasis teknologi;
- Belum optimalnya dukungan dari mitra kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengirim ASN dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi untuk mengikuti bimtek dan diklat;
2. Penyediaan anggaran yang memadai guna memaksimalkan upaya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja;
4. Melakukan pengembangan aplikasi, khususnya aplikasi yang memudahkan pelayanan berbasis teknologi.

2. Faktor Pendorong

1. Jumlah wajib pajak semakin bertambah;
2. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif dan progresif;
3. Kemajuan ilmu dan teknologi;
4. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dan jumlah petugas pajak yang memadai;
5. Potensi pajak yang cukup besar;
6. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
7. Ditunjukkanya Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut diatas akan berdampak pada pencapaian visi misi Walikota yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten dengan sasaran meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya didukung dengan potensi yang sangat besar sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, mulai dari proses pendataan dan pendaftaran hingga proses penagihan.

Dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, BPPRD perlu melakukan Langkah-langkah seperti :

- a. Meningkatkan pendataan dilapangan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja;
- e. Meningkatkan pengembangan pelayanan berbasis teknologi.

Dengan demikian dalam proses pencapaian peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pajak dan retribusi daerah perlu di dukung dengan jumlah SDM yang banyak serta kompeten dan juga di dukung dengan ketersediaan anggaran operasional serta sarana dan prasarana dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)”

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjabaran rumusan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD pada dasarnya tidak mengalami perubahan.

Pada Renja SKPD Tahun 2023 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru. Program dan Kegiatan Renja SKPD sesuai Renstra Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memuat 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak banyak berubah, akan tetapi jenis kegiatan dan target rencana capaian kinerja (besaran/volume) yang sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yaitu pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dikarenakan aspirasi/usulan yang muncul berasal dari usulan SKPD terkait langsung dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program prioritas pembangunan bidang urusan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan tentunya juga selaras dengan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi dimana sinergi dengan prioritas pembangunan nasional antara lain pembangunan bidang urusan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota , memuat **visi** :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”

MAJU adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

SEJAHTERA adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.

Adapun **misinya** pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan beakhlak mulia.**
2. **Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.**
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Banjarbaru untuk tahun 2021-2026 maka tujuan dan Sasaran Kerja SKPD masih disesuaikan dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menetapkan sasaran jangka menengah SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Untuk mewujudkan tujuan, perlu menetapkan sasaran pokok yang akan dituju yaitu : ***“Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”.***

Adapun tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai pada perubahan tahun 2023 adalah seperti pada table berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2023
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp.170.418.146.000,-
			Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp.12.988.471.875,-
			Rasio pendapatan asli daerah (PAD)	100%
			Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Tahun 2023 adalah **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :**

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- c. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- e. Penagihan Pajak Daerah
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Dan 1 (satu) program penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

A. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor

- b. Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Unit Pelayanan Teknis Pajak Daerah Wilayah 1 (UPTPD 1)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
- b. Penyediaan Barang Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

C. Unit Pelayanan Teknis Pajak Daerah Wilayah 2 (UPTPD 2)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
- b. Penyediaan Barang Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun perumusan program dan kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023 PERUBAHAN
Kota Banjarbaru

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023					Keterangan
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
SEKRETARIAT									
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Banjarbaru	100%	14.891.396.250	17.595.593.330	2.704.197.080	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan,Penganggaran yang Responsif Gender Persentase	Banjarbaru	100%	55.750.000	106.750.000	51.000.000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	6 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	12 Laporan	30.750.000	81.750.000	51.000.000	Penambahan honor pejabat pengelola keuangan
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Banjarbaru	100%	12.975.665.180	13.906.447.600	930.782.420	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	52 Orang/Bulan	12.956.184.680	13.886.967.100	930.782.420	Penambahan gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	4 Laporan	19.480.500	19.480.500	-	
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Banjarbaru		28.250.000	28.250.000	-	
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekoneiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	8 Laporan	28.250.000	28.250.000	-	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	848.417.850	1.235.786.850	387.369.000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Banjarbaru	2 Paket	40.000.000	77.000.000	37.000.000	Penambahan belanja modal tiang reklame, pemeliharaan jaringan listrik
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Banjarbaru	7 Paket	389.716.750	389.716.750	-	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banjarbaru	2 Paket	47.852.600	47.852.600	-	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Dokumen	3.028.500	3.028.500	-	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	50 Laporan	367.820.000	718.189.000	350.369.000	Penambahan perjalanan dinas
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Sarana dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	Banjarbaru	100%	271.000.000	1.415.075.000	1.144.075.000	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Unit	-	486.306.000	486.306.000	Penambahan belanja modal mobil dinas jabatan
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Banjarbaru	3 Unit	-	560.000.000	560.000.000	Penambahan belanja modal mobil dan kendaraan roda dua operasional kantor
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	33 Unit	271.000.000	324.530.000	53.530.000	Penambahan belanja modal pingerprint vacuum cleaner, dispenser, kamera, laptop & printer dot matrik
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	5 Unit	-	44.239.000	44.239.000	Penambahan belanja modal lemari dan mebel
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	317.798.220	281.779.880	(36.018.340)	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banjarbaru	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	-	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	12 Laporan	287.798.220	251.779.880	(36.018.340)	Pengurangan iuran bpjs kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023					Keterangan
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Banjarbaru	100%	394.515.000	621.504.000	226.989.000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Banjarbaru	1 Unit	37.995.000	52.984.000	14.989.000	Penambahan belanja pelumas, suku cadang dan pemeliharaan
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	38 Unit	293.550.000	293.550.000	-	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banjarbaru	51 Unit	27.020.000	48.520.000	21.500.000	Penambahan belanja untuk pemeliharaan printer dan service komputer
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	1 Unit	-	175.000.000	175.000.000	penambahan belanja rehab ruang kepala badan, sewa bunga, pengecatan pagar kantor, pengecatan dinding gedung kantor
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	49 Unit	35.950.000	51.450.000	15.500.000	Penambahan belanja pemeliharaan kursi, ac, dispenser
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN									
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah - Rasio PAD - Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	Banjarbaru	100%	868.717.100	994.417.100	125.700.000	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah - Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	- Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah - Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah - Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	Banjarbaru	100%	868.717.100	994.417.100	125.700.000	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Banjarbaru	4 Laporan	416.317.100	535.017.100	118.700.000	Penambahan untuk belanja ATK, makan minum operasional lapangan, belanja jasa tenaga ahli (honor petugas pendata, tim APH)
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Banjarbaru	4 Dokumen	452.400.000	459.400.000	7.000.000	Penambahan belanja makan minum operasional
BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah - Rasio PAD - Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	Banjarbaru	100%	2.036.630.000	1.078.810.000	(957.820.000)	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Meningkatnya Penerimaan pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB) - Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah - Penurunan Tunggakan pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB) - Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Banjarbaru	100%	2.036.630.000	1.078.810.000	(957.820.000)	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Banjarbaru	4 Dokumen	1.541.000.000	527.640.000	(1.013.360.000)	Pengurangan sewa CRO
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Banjarbaru	4 Dokumen	495.630.000	551.170.000	55.540.000	Penambahan ATK, makan minum aktifitas lapangan, Honor petugas monitoring & petugas pajak, hadiah untuk wajib pajak
BIDANG PBB DAN BPHTB									
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah - Rasio PAD - Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	Banjarbaru	100%	2.544.731.900	3.459.090.800	914.358.900	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Meningkatnya Penerimaan PBB-P2 Meningkatnya Penerimaan BPHTB Penurunan Tunggakan PBB-P2	- Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 Meningkatkan Penerimaan BPHTB Menurunnya Tunggakan PBB-P2	Banjarbaru	100%	2.544.731.900	3.459.090.800	914.358.900	
5 02 04 2.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Banjarbaru	12 Laporan	1.078.255.300	1.506.978.300	428.723.000	Penambahan untuk belanja pakaian dinas lapangan, makan minum aktivitas lapangan, belanja internet langganan lisensi geospasial, pemeliharaan jaringan database server, belanja modal ups server, hardisk eksternal dan router jaringan
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Banjarbaru	28 Dokumen	1.466.476.600	1.952.112.500	485.635.900	Penambahan untuk belanja ATK, makan minum tamu (undangan PBB), makan minum rapat, Honorarium tim pelaksana kegiatan (honor validasi dan verifikasi data piutang)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023					Keterangan
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatf (Rp)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
TOTAL PAGU BPPRD						20.341.475.250	23.127.911.230	2.786.435.980	
UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I						192.496.500	221.284.500	28.788.000	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Internal	Banjarbaru	100%	192.496.500	221.284.500	28.788.000	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	100%	97.204.500	117.204.500	20.000.000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Banjarbaru	5 Paket	20.000.000	20.000.000	-	Penambahan belanja ATK, bahan komputer dan makan minum operasional lapangan
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Banjarbaru	6 Paket	58.410.500	68.410.500	10.000.000	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Paket	5.219.000	5.219.000	-	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Dokumen	1.485.000	1.485.000	-	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	2 Laporan	12.090.000	22.090.000	10.000.000	Penambahan belanja perjalanan dinas
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	100%	10.530.000	10.530.000	-	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	-	-	-	-	
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	3 Unit	10.530.000	10.530.000	-	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	100%	47.400.000	47.400.000	-	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banjarbaru	12 Laporan	28.800.000	28.800.000	-	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	12 Laporan	18.600.000	18.600.000	-	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	100%	37.362.000	46.150.000	8.788.000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	5 Unit	28.042.000	36.830.000	8.788.000	Penambahan belanja bahan bakar dan pelumas, suku cadang dan pemeliharaan
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banjarbaru	12 Unit	6.880.000	6.880.000	-	
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	5 Unit	2.440.000	2.440.000	-	
UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II						196.721.000	235.055.000	38.334.000	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Internal	Banjarbaru	100%	196.721.000	235.055.000	38.334.000	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	100%	88.245.000	116.588.000	28.343.000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Banjarbaru	5 Paket	20.000.000	20.000.000	-	Penambahan belanja ATK, bahan komputer dan makan minum operasional lapangan
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Banjarbaru	6 Paket	49.450.000	67.793.000	18.343.000	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Paket	5.220.000	5.220.000	-	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Dokumen	1.485.000	1.485.000	-	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	2 Laporan	12.090.000	22.090.000	10.000.000	Penambahan belanja perjalanan dinas
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	100%	28.660.000	28.660.000	-	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	3 Unit	10.500.000	10.500.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023					Keterangan
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatf (Rp)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	12 Unit	18.160.000	18.160.000	-	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	100%	45.600.000	45.600.000	-	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banjarbaru	12 Laporan	27.000.000	27.000.000	-	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	12 Laporan	18.600.000	18.600.000	-	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	100%	34.216.000	44.207.000	9.991.000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	6 Unit	31.166.000	41.157.000	9.991.000	Penambahan belanja bahan bakar dan pelumas, suku cadang dan pemeliharaan
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banjarbaru	5 Unit	3.050.000	3.050.000	-	
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	Unit	-	-		
TOTAL PAGU BPPRD , UPT I & UPT II						20.730.692.750	23.584.250.730	2.853.557.980	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur dan output rencana kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan tersusunnya penjelasan umum Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah mempunyai pedoman kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 diharapkan dapat terimplementasi langsung kepada masyarakat dan atau lingkungan Kota Banjarbaru.

Masukan yang berarti dan bermanfaat, sangat kami perlukan untuk langkah kedepan dalam membangun Kota Banjarbaru menuju Kota Berkarakter.

Banjarbaru, Oktober 2023
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah



KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19740528 199503 1 003



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 13 Oktober 2023

Nomor : 700.1/99/X/ItKo/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Hasil Reviu (LHR) Rencana Kerja
Perubahan Tahun 2023 SKPD

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

di
Banjarbaru

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Nomor 700/212-ST/2023/INSPEKTORAT tanggal 27 Juli 2023, Tim Reviu Renja SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru telah melakukan Reviu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Reviu dilakukan atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan RKPD Perubahan Tahun 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006151990031006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

**LAPORAN HASIL REVIU ATAS RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2023 PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU**

Nomor : 700.1.2.1/28/X-Lap/ItKo/2023

A. Pendahuluan

1. Umum/ latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah wajib menyusun Renja yang merupakan penjabaran dari RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah dan merupakan pedoman kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan dan kinerjanya serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus memuat paling sedikit memuat: Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup. Selain itu tim penyusun Renja perangkat daerah juga harus memperhatikan kelengkapan pendukung Renja; dan kesesuaian indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 16 menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran daerah. Dan dengan ditetapkannya Permendagri 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah, APIP bertugas melaksanakan reviu dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan dokumen perencanaan daerah.

Reviu atas Rancangan akhir Renja Perubahan perangkat daerah Tahun 2024 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru mulai tanggal 1 s.d. 14 Agustus 2023, dengan fokus reviu memastikan bahwa rumusan rancangan akhir Renja telah sesuai dengan RKPD beserta lampirannya dan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja perangkat daerah dengan rancangan akhir RKPD;
- b. Pengujian atas kesesuaian substansi antar BAB pada rancangan akhir Renja;
- c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

3. Maksud dan Tujuan

Tujuan Reviu dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan,

bahwa :

- a. Informasi dalam Renja Perubahan Tahun 2023 telah sesuai dengan RKPD Tahun 2023;
- b. Perumusan dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2023 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan antara lain pendekatan perencanaan terpadu, berbasis kinerja dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 serta wawancara dengan pejabat yang terkait proses penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 700/212-ST/2023/Inspektorat Tanggal 27 Juli 2023 dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Drs. Rahmat Taufik, M.Si
Wakil Penanggung Jawab	:	Hj. Rosita, S.Pt, MS
Supervisor	:	Indah Wahyuni Damayanti, AP, M.Si
Ketua Tim	:	Agus Mulyono, S.Sos
Anggota Tim	:	Hj. Rusda Lainah, S.Sos, MM
		Endang Pujiastuti, SP
		Noor Adi Afriantoni, SH
		Marsha Triandrie, S.A.P.

C. Hasil yang dicapai

Reviu dilakukan dengan meneliti dokumen Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 dan dokumen rancangan akhir Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adapun hasil reviu yang didapatkan adalah:

1) Kesesuaian Sistematika Penyusunan dan Isi Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2023

Pengujian Kesesuaian Sistematika dan Isi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Permendagri tersebut Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Penutup

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang diserahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sistematika penyusunan dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan dengan Program dan Kegiatan dalam RKPD Perubahan dan Renstra

Pengujian kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Banjarbaru telah sesuai.

3) Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator dan Target Kinerja dalam Renja Perubahan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator dan Target Kinerja dalam RKPD Perubahan Tahun 2023

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Pada Bidang

Pengendalian dan Pengembangan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Pada Bidang Pajak dan Retribusi, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Pada Bidang PPB dan BPTHB, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Pada UPT Pajak Daerah Wilayah I, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dan Pada UPT Pajak Daerah Wilayah II, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja Perubahan Tahun 2023 dengan RKPD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2023 didapati bahwa Indikator dan target kinerja pada kedua dokumen tersebut telah selaras.

4) Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja dalam Renja dengan Indikator dan Target Kinerja dalam Renstra

Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja Perubahan Tahun 2023 dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 didapati indikator dan satuan target kinerja yang tidak sesuai atau tidak konsisten antar kedua dokumen. Namun pada tabel 6.1 pada Renstra SKPD telah dilakukan penyesuaian terhadap Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil revidi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistematika Penyusunan dan Isi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah sesuai dengan tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja

Perubahan;

2. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan dengan Program dan Kegiatan dalam RKPD Perubahan dan Renstra SKPD telah sesuai;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator dan Target Kinerja dalam Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator dan Target Kinerja dalam RKPD Perubahan Tahun 2023 telah selaras;
4. Indikator dan Target Kinerja dalam Renja dengan Indikator dan Target Kinerja dalam Renstra telah dilakukan penyesuaian.

Dari hasil reviu di atas, tidak ada saran atau rekomendasi yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

E. Penutup

Inspektorat Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Rancangan Akhir Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

Dibuat di Banjarbaru,
pada tanggal, 10 Oktober 2023

Inspektur Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006151990031006